



I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan pesat yang dialami dalam akuntansi pemerintahan menuntut publik untuk meminta pengelolaan dan pencatatan dana yang transparan dan akuntabel dalam pelaporan kinerja pemerintahan. Akuntansi pemerintahan digunakan secara khusus untuk mencatat dan melaporkan kegiatan dan transaksi serta kepengurusan dan administrasi keuangan negara sesuai dengan sistem akuntansi yang berlaku. Laporan keuangan dibuat dengan tujuan untuk menyediakan informasi yang berkaitan langsung dengan keuangan dan transaksi yang dilakukan dalam masa satu periode pelaporan. Laporan keuangan memiliki fungsi sebagai pembanding antara anggaran belanja dan realisasi biaya yang digunakan, serta menilai kondisi keuangan dan kondisi satuan kerja pemerintahan. Pemerintah Kota Bogor menggunakan peraturan yang berlaku yaitu Peraturan Wali Kota No.130 Tahun 2019 dan Peraturan Wali Kota Bogor No.69 Tahun 2020 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Bogor dan Peraturan Pemerintah No.71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Peraturan Pemerintah No.71 Tahun 2010 menjadi acuan utama dalam penyajian laporan keuangan pada setiap satuan kerja pemerintahan. Adanya peraturan pemerintah dalam penyajian laporan keuangan membuat laporan menjadi lebih tepat, akurat, dan dapat dipercaya. Dalam pengelolaan laporan keuangan, pengakuan dan pengukuran merupakan hal yang harus diperhatikan karena berdampak pada sebuah peristiwa yang akan dimuat dalam laporan. Informasi yang ada dalam laporan keuangan dilampirkan pada setiap laporan yang susunannya diatur berdasarkan peraturan yang berlaku.

Selain itu, hal lain yang berpengaruh dalam penyajian laporan keuangan adalah sistem akuntansi dan pengendalian internal. Hal-hal tersebut dibutuhkan dalam menjalankan siklus perencanaan, penganggaran, pelaksanaan anggaran, pengawasan, dan pertanggungjawaban. Sistem akuntansi digunakan oleh lembaga pemerintahan dalam mengelola laporan keuangan dengan tujuan agar menghasilkan informasi keuangan yang tepat, akurat, dan dapat dipercaya. Pengendalian internal berperan sangat penting dalam pengelolaan laporan keuangan karena setiap laporan keuangan harus disusun berdasarkan bidangnya untuk menghindari kesalahan fatal dan kecurangan yang mungkin akan dilakukan.

Soetjipto dan Sudikdiono (2013) menyatakan bahwa pemerintah daerah merupakan entitas pelaporan yang bertugas untuk menyusun dan menyajikan laporan keuangan, sedangkan kepala SKPD merupakan entitas akuntansi yang bertugas untuk menyusun dan menyajikan laporan keuangan SKPD yang akan dilaporkan ke PPKD dan nantinya akan menghasilkan laporan keuangan pemerintah daerah. Dalam hal ini, Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kota Bogor merupakan satuan kerja yang bertanggungjawab dalam menyelenggarakan penyusunan akuntansi atas transaksi yang terjadi di lingkungan pemerintahan khususnya daerah Kota Bogor. Tahun 2020 terjadi suatu bencana yang terjadi hampir di seluruh dunia yaitu pandemik COVID-19 yang menyebabkan terjadinya penurunan ekonomi yang akan berakibat dalam laporan keuangan milik perusahaan dan instansi pemerintahan. Meskipun demikian, sebagai satuan kerja Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kota Bogor bertugas untuk menyusun, mengelola, dan menyajikan laporan keuangan yang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik IPB (Institut Pertanian Bogor)

Bogor Agricultural University

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.



dapat digunakan sesuai dengan peristiwa yang terjadi dan aturan yang berlaku. Berdasarkan penjelasan di atas, maka penulis memilih judul **“Perlakuan Akuntansi atas Laporan Keuangan pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bogor sebagai SKPD”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka rumusan masalah yang akan dibahas dalam laporan akhir ini adalah:

1. Bagaimana pengakuan unsur laporan keuangan pada BKAD Kota Bogor?
2. Bagaimana susunan laporan keuangan pada BKAD Kota Bogor?
3. Bagaimana penyajian laporan keuangan pada BKAD Kota Bogor?

1.3 Tujuan

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari laporan akhir ini adalah:

1. Menguraikan pengakuan unsur laporan keuangan pada BKAD Kota Bogor.
2. Menguraikan susunan laporan keuangan pada BKAD Kota Bogor.
3. Menguraikan penyajian laporan keuangan pada BKAD Kota Bogor.

1.4 Manfaat

Adapun manfaat yang diharapkan oleh penulis dari laporan akhir ini, adalah sebagai berikut :

1. Bagi Akademik
Penulis berharap bahwa Laporan akhir dapat digunakan untuk menambah wawasan dan pengetahuan serta sumber informasi mengenai penyajian laporan keuangan di SKPD.
2. Bagi Instansi
Penulis berharap bahwa Laporan Akhir ini dapat membantu instansi untuk menjadi bahan evaluasi laporan keuangan.
3. Bagi Penulis
Laporan Akhir ini diharapkan dapat menambah pemahaman dan kemampuan dalam penyajian laporan keuangan di SKPD.

